HASIL KERJA TIM PERCEPATAN REFORMASI HUKUM

Puluhan Rekomendasi Disampaikan ke Presiden

JAKARTA (KR) - Tim Percepatan Reformasi Hukum telah menghasilkan puluhan butir rekomendasi agenda prioritas percepatan reformasi hukum. Rekomendasi tersebut akan segera dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.

"Saya terima hasilnya yang secara umum bagus. Presiden memang melihat adanya urgensi untuk mereformasi bidang hukum, yang kemudian meminta Menko Polhukam melakukan pembenahan, dan ditindaklanjuti, termasuk dengan membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum ini, yang hasilnya akan segera kita sampaikan kepada bapak Presiden," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Jakarta, Selasa (12/9) usai koordinasi terakhir Tim Percepatan Reformasi Hukum dengan para anggota dan masing-masing Ketua Pokja di Gedung Kemenko Polhukam.

Sebagian peserta hadir secara langsung dan selebihnya terutama yang di luar kota hadir secara daring. Masing-masing Pokja menyampaikan paparan akhir kepada Menko Polhukam yang langsung mendapat respons balik dari Menko Mahfud MD.

Hasil rekomendasi agenda prioritas ini rencananya disampaikan kepada Presiden pada Kamis (14/9), untuk selanjutnya pemerintah akan melakukan pembenahan dan reformasi di bidang Hukum.

"Kita akan bersama-sama menyampaikan rekomendasi agenda prioritas ini kepada Presiden," ujar Mahfud.

Puluhan rekomendasi agenda prioritas percepatan reformasi hukum tersebut dihasilkan oleh empat Pokja, yaitu Pokja Reformasi Peradilan dan Penegakan Hukum, Pokja Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam, Pokja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Pokja Sektor Perundang-undangan.

Selain itu Tim Percepatan Reformasi Hukum secara intens bekerja sepanjang Juni-Agustus 2023, dan telah melakukan diskusi berbagai tahapan, serangkaian kegiatan pengumpulan data dan informasi, termasuk melalui konsultasi dengan pimpinan Kementerian dan Lembaga, serta kelompok masyarakat sipil.

Prof Harkristuti Harkrisnowo, selaku ketua Pokja Reformasi Peradilan dan Penegakan Hukum menyampaikan bahwa seluruh Pokja telah menyepakati hasil rekomendasi tersebut.

"Pokja tidak hanya melakukan diskusi secara parsial, tetapi juga melakukan pembahasan bersama-sama dengan semua Pokja, sehingga masing-masing Pokja mengetahui dan menyepakati rekomendasi dari Pokja lainnya," tuturnya. **(Ant/Has)-f**

DANAIS UNTUK JAGA WARGA

Difasilitasi 7.777 Handy Talky dan Rompi

KR-Istimewa

Aris Eko Nugroho SP MSi

YOGYA (KR) - Berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan dan ketenteraman bagi masyarakat Yogya. Salah satunya melalui kelompok Jaga Warga. Karena itu, untuk menunjang kiprah Jaga Warga di masyarakat, kelompok Jaga Warga mendapat dukungan dana keistimewaan (danais).

Menurut Paniradya Pati Kaistimewan DIY Aris Eko Nugroho SP MSi, di dalam pasal 5 UU Nomer 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat pengaturan lima tujuan keistimewaan, salah satunya mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat yang diwujudkan melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan pengembangan kemampuan masyarakat, sehingga Jaga Warga menjadi salah satu aktivitas yang didukung dengan dana keistimewaan.

Dukungan terhadap Jaga Warga, lanjut Aris, untuk pembinaan (peningkatan kapasitas SDM), fasilitasi pembentukan Jaga Warga (rapat-rapat), fasilitasi Omah Jaga Warga (rembuk padukuhan/patroli untuk menyelesaikan permasalahan di lingkup padukuhan), dan pemberian/fasilitasi sarpras bagi kelompok-kelompok Jaga Warga.

Untuk bantuan Handy Talky (HT) yang diberikan memang belum semuanya mendapatkan. "Direncanakan sampai dengan akhir tahun sejumlah 7.777 unit HT diberikan kepada Jaga Warga, meliputi 637 padukuhan pada 64 kapanewon dan 169 kampung pada 14 kemantren," jelasnya.

Selain HT, lanjut Aris, juga diberikan rompi dan peningkatan SDM, rapat, rembuk padukuhan maupun bantuan mendukung patrol.

Tahun 2023, menurut Aris, dana keistimewaan yang dikucurkan sebanyak Rp 14, 2 miliar yang dibagi tiga aktivitas utama, yaitu BKK 41 Omah Jaga Warga sebesar Rp 2,05 miliar dan hibah sarana sebesar Rp 7,5 miliar. Sedangkan sisanya dipergunakan untuk mendukung aktivitas Jaga Warga seperti pembinaan, patroli operasi dan lain-lain.

Diharapkan, sesuai dengan Pergub 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga, bahwa Kelompok Jaga Warga mempunyai fungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial, sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada dukuh/ketua RW/ketua pengurus kampung, dan sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. "Harapan puncaknya bahwa pengaturan tujuan keistimewaan dapat tercapai seperti yang diharapkan masyarakat DIY," katanya.

Dana keistimewaan untuk Jaga Warga ini meliputi kabupaten dan kota, sehingga aspek keterlindungan masyarakat DIY menjadi kewajiban pemerintah daerah DIY bekerja sama dengan semua pihak terkait.

Kelompok Jaga Warga beranggotakan maksimal 25 orang. Setiap kelompok Jaga Warga ini di bawah komando lurah dan di setiap kalurahan dibuat Omah Jaga Warga yang dipimpin Jagabaya. Untuk saat ini terdapat 2.745 kelompok Jaga Warga dari 4.667 padukuhan/kampung se-DIY. Keseluruhan anggota Jaga Warga se-DIY mencapai 50 ribu orang lebih. Jaga Warga semangatnya adalah partisipasi warga.

Pemda DIY menghargai semangat itu dengan memfasilitasi seragam/rompi Jaga Warga dan Handy Talky (HT) melalui danais untuk berkoordinasi antaranggota atau antar Jaga Warga. **(Wan)**

KR-Istimewa

Aris Eko Nugroho SP MSi menyerahkan bantuan HT untuk Jaga Warga.

UNTUK ALASAN PEMBINAAN

Tempat Penahanan Sambo Cs Dipindah

JAKARTA (KR) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memindahkan tempat penahanan terhadap empat terpidana kasus pembunuhan Brigadir J. Para terpidana tersebut adalah Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Wibowo.

Ferdy Sambo yang sebelumnya dieksekusi Kejari Jakarta Selatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Salemba Jakarta, dipindahkan ke Lapas Cibinong Bogor. Sementara Putri Chandrawati yang sebelumnya dieksekusi di Lapas Wanita Pondok Bambu dipindahkan ke Lapas Kelas II Tangerang.

Pemindahan lapas para terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J itu dengan pertimbangan untuk pembinaan. Kasubag Publikasi Ditjen PAS Kemenkumham Rika Aprilianti yang dikonfirmasi wartawan membenarkan hal tersebut. "Iya (dipindahkan) dengan pertimbangan pembinaan," ujarnya di Jakarta, Selasa (12/9).

Mengenai pemindahan para terpidana tersebut, menurut Rika, dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2023. Ditjen PAS Kemenkumham juga memindahkan lapas tempat penahanan Ricky Rizal Wibowo, mantan ajudan Ferdy Sambo dan Kuat Ma'ruf, mantan ART Ferdy Sambo ke lapas yang sama, Lapas Cibinong. Sebelumnya, kedua terpidana itu ditahan di Lapas Kelas II Salemba.

Rika menjelaskan, pemindahan ini dilakukan dengan pertimbangan pembinaan dan dipastikan tidak ada perlakuan khusus terhadap para terpidana. "Dan dalam hal ini tidak ada perlakuan khusus," tegasnya.

Ditanya apakah Ferdi Sambo berada satu sel dengan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf selama penahanan di Lapas Cibinong, Rika tidak menjawab secara detail, hanya menyampaikan ketiganya berada di satu lapas. "Semua ditempatkan di Lapas Cibinong," kilahnya.

Sebelumnya lima terpidana pembunuhan Brigadir J itu dieksekusi Kejaksaan Agung setelah mendapat kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung (MA) pada Kamis (24/8). Untuk Ferdy Sambo menjalani pidana penjara seumur hidup berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 813.K/Pid/2023 tanggal 8 Agustus 2023.

Sementara Putri Chandrawati menjalani pidana 10 tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 816K/PID/2023 tanggal 8 Agustus 2023. Sedang Kuat Ma'ruf menjalani pidana selama 10 tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 815K/Pid/2023 tanggal 8 Agustus 2023, Ricky Rizal Wibowo menjalankan pidana selama delapan tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 814K/Pid/2023 tanggal 8 Agustus 2023. **(Ful)-f**

RICUH DI BATAM, 43 ORANG DIAMANKAN

Presiden Sebut Komunikasi Kurang Baik

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, konflik terkait persoalan pengosongan lahan di Pulau Rempang Kepulauan Riau, disebabkan oleh komunikasi yang kurang baik. Konflik antara aparat keamanan dan warga Rempang itu tidak seharusnya terjadi jika warga setempat diajak bicara dan diberi solusi atas rencana pengembangan proyek Rempang Eco City oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.

"Karena di sana sebenarnya sudah ada kesempatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah," kata Jokowi di sela-sela kunjungannya ke Pasar Kranggot Cilegon Banten, Selasa (12/9).

Untuk menindaklanjuti penanganan konflik tersebut, Jokowi menugaskan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk memberikan penjelasan langsung kepada warga Rempang terkait pelaksanaan proyek investasi tersebut. Dikutip dari laman BP Batam, Rempang Eco City merupakan salah satu proyek yang terdaftar dalam Program Strategis Nasional 2023 yang pembangunannya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus.

Proyek Rempang Eco City merupakan kawasan industri, perdagangan, hingga wisata terintegrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia. Proyek tersebut akan digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) dengan target investasi mencapai Rp 381 triliun pada 2080. PT MEG merupakan rekan BP Batam dan Pemkot Batam. Nantinya, perusahaan itu akan membantu pemerintah menarik investor asing dan lokal dalam pengembangan ekonomi di Pulau Rempang.

Terkait konflik yang berbuntut kericuhan di proyek tersebut, Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) Irjen Tabana Bangun menyebutkan ada kemungkinan bertambahnya jumlah pelaku kericuhan saat unjuk rasa penolakan relokasi Kawasan Pulau Rempang di depan kantor BP Batam pada Senin (11/9).

"Dari laporan anggota, masih ada yang terindikasi melakukan tindakan yang melanggar hukum kemarin. Identitas-nya sudah kami ketahui, hanya kami masih kembangkan kembali. Sehingga proses penegakan hukum bisa lebih optimal," ujarnya.

Kapolda menjelaskan, saat ini sudah ada 43 orang yang diamankan oleh pihak Kepolisian waktu terjadinya kericuhan. Mereka diduga sebagai pelaku yang melakukan kekerasan terhadap petugas dan perusakan fasilitas di kantor BP Batam. Selain itu, dari hasil penyelidikan sementara yang dilakukan pihaknya, diketahui dari 43 orang yang diamankan ini tidak semuanya yang berasal dari Pulau Rempang. **(Ant/Has)-f**

KR-Antara/M Risyal Hidayat

SYUKURAN HUT KE-64 PEPABRI: Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) berjalan bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar (kiri), saat Syukuran HUT ke-64 Pepabri di Wisma Elang Laut di Jakarta, Selasa (12/9/2023).

MENTERI PAN-RB PASTIKAN

Tak Ada Penghapusan Honorer

JAKARTA (KR) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas memastikan tidak akan ada penghapusan 2,3 juta tenaga honorer yang sebelumnya diisukan akan dilakukan pada November 2023.

"Yang penting, nanti di November ini tidak akan ada PHK massal untuk 2,3 juta ini. karena kalau 2,3 juta ini ada pemberhentian seperti PP yang tadi, maka ini akan berdampak pada pelayanan publik dan lain-lain," ujar Azwar Anas di Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (12/9).

Azwar khawatir jika terjadi penghapusan honorer berdampak pada setiap aspek pelayanan, termasuk tingginya angka pengangguran. Ia menyebut banyak pegawai honorer yang melayani sektor-sektor vital pelayanan publik.

Kendati demikian, Pemerintah tidak boleh mengangkat atau merekrut tenaga honorer baru. Ia pun telah berkirim surat kepada Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer untuk 2024. "Nah formatnya seperti apa, finalnya kita bahas RUU ASN bulan depan sudah bisa kita sahkan," katanya.

Nantinya, di RUU ASN, pengangkatan ASN tidak hanya setahun atau dua tahun sekali, tetapi bisa kapan saja untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan, seperti pensiun.

"Jadi dengan demikian tak seperti selama ini, bila kosong, diisi honorer," katanya. **(Ant/San)-d**

KEMENTERIAN PUPR

Percepat Proyek Strategis Nasional

JAKARTA (KR) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat penyelesaian proyek-proyek berkategori Proyek Strategis Nasional (PSN) agar dapat rampung pada tahun 2024.

"Pada prinsipnya kita ingin proyek-proyek tersebut tidak terbengkalai, kita pastikan proyek-proyek tersebut dapat diselesaikan pada tahun depan," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/9).

Menurut Zainal Fatah, sebelumnya terdapat arahan bahwa proyek-proyek pembangunan infrastruktur dapat selesai pada pertengahan tahun depan. "Untuk proyek pembangunan infrastruktur yang penyelesaiannya harus melewati Semester I Tahun 2024, maka kita harus minta izin karena kalau tidak izin proses kontrak tahun jamak (multi years contract) dan sebagainya tidak bisa diproses oleh keuangan. Tentu yang dimintakan izin adalah proyek-proyek berkategori PSN," katanya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan delapan PSN dapat diselesaikan pada Semester II-2024. Kedelapan proyek tersebut terdiri lima bendungan dan tiga jalan tol. Kelima proyek bendungan itu adalah Bendungan Bener di Jawa Tengah, Bendungan Lau Simeme di Sumatera Utara, Bendungan Gudong-gudong dan Bulongo di Gorontalo, dan Bendungan Mbay di NTT. Sedangkan untuk tiga jalan tol PSN yakni Proyek Jalan Tol Serang-Panimbang, Jalan Tol Akses Patimban, dan Jalan Tol Semarang-Demak. **(Ant/San)-d**